

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 PADA
PUTUSAN NOMOR 737/Pid. B/2019/PN Bdg**

Di Susun Oleh :
Mohamad Eka Pratama
41151010160105

STUDI KASUS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menempuh Sidang
Tugas Akhir Dan Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Universitas Langlangbuana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

***APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS BASED ON
LAW NO. 11 OF 2008 ON VERDICT NO. 737/Pid.
B/2019/PN Bdg***

Arranged By :

Mohamad Eka Pratama

41151010160105

CASE STUDY

To Meet One of the Requirements for Attending the Session

Final Assignments And Getting A Bachelor's Degree

Law of Langlangbuana University



***FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020***

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat studi kasus yang berjudul : **“Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pada Putusan Nomor 737/Pid. B/2019/PN Bdg”**.

Penulisan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran – saran dan bahan masukan serta data – data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
7. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Dewi Rohayati S.H., M.H., selaku dosen wali.
10. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu ibu Purnomowati dan bapak Ahmad Taufik Serta kerabat dekat saya yang telah membantu dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT.

Bandung, 7 September 2020

Penulis

ABSTRAK

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tau pasti hasilnya. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, kini telah berubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Tinjauan khusus pada studi kasus ini adalah perjudian togel online dengan putusan no 737/Pid.B/2019/PN.BDG Dikaitkan dengan pasal 27 ayat 2 undang-undang ITE permasalahan yang terjadi pada kasus ini adalah kesalahan jaksa penuntut dalam mennetukan putusan menggunakan pasal 303 ayat 1 kuhp tentang penertiban perjudian. Pasal yang digunakan seharusnya adalah pasal 27 ayat 2 undang-undang ITE tentang perjudian yang berbunyi, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya infomari atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Hasil akhir persidangan tersebut berupa putusan hakim menjatuhkan pasal 303 ayat 1 KUHP dengan pidana penjara selama 8 bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah). Hakim menjatuhkan hukum tersebut atas dasar perjudian togel sedangkan seharusnya penulis menyarankan menggunakan pasal 27 ayat 2 undang-undang ite karena perjudian tersebut dilakukan secara online. Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Dalam hukum pidana dikenal berlakunya *asas lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum yang diatur dalam ketentuan Pasal 63 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jika di lihat dari *lex spesialis* Pasal 303 ayat (1) KUHP seharusnya memakai Pasal 27 ayat (2) tentang Undang-undang ITE karena jika di lihat para terdakwa memakai media elektronik seperti HP untuk menghubungkan kepada agen usaha togel tersebut dan menurut keterangan saksi cara untuk mendaftarkan nomor pada judi toto gelap tersebut harus melalui akses internet oleh karena itu sebenarnya sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran elektronik.

Abstract

Gambling is a deliberate gamble that is to risk a value or something that is considered valuable by being aware of certain risks and expectations in the events of games, matches, races, and events that do not or do not know the exact outcome. The criminal act of gambling or participating in gambling has been prohibited in the criminal provisions of Article 303 of the Penal Code (Penal Code) and based on the provisions stipulated in Article 2 paragraph (4) of Law No. 7 of 1974 on the Regulation of Gambling, has now changed its designation to a criminal provision stipulated in Article 303 of the Penal Code (Criminal Code).

A special review of this case study is online togel gambling with verdict no 737/Pid.B/2019/PN. BDG Associated with article 27 paragraph 2 of the ITE law the problem in this case is the prosecutor's error in disputing the verdict using article 303 paragraph 1 of the penhp on the regulation of gambling. The article used should be article 27 paragraph 2 of the ITE law on gambling which reads, "any person knowingly and without the right to distribute, transmit, and/or make accessible infomari or electronic documents that have gambling content."

The final result of the trial was the judge's decision to impose article 303 paragraph 1 of the Penal Code with a prison sentence of 8 months and pay the cost of the case amounting to Rp.2,000.00- (two thousand rupiah). The judge sentenced the law on the basis of gambling togel while the author should have suggested using section 27 paragraph 2 of the law because the gambling was done online. Application of The Principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis. In criminal law it is known that the principle of lex specialis derogat legi generalis is one of the principles of law, which means that a special rule of law will override the general rule of law stipulated in the provisions of Article 63 Paragraph 2 of the Criminal Code, If seen from lex specialist Article 303 paragraph (1) the Criminal Code should use Article 27 paragraph (2) of the ITE Act because if seen the defendants use electronic media such as HP to contact the business agent of the togel and according to witness statements how to register the number on the dark toto gambling must be through internet access therefore there is actually a Law governing electronic violations.

DAFTAR ISI

PERYATAAN
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI ..1	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	7
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK..... 11	
A. Masalah Hukum.....	11
B. TINJAUAN TEORITIK	11
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjudian	11
2. Tinjauan Umum Perjudian Online	17
3. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	31
4. Tinjauan Umum Tersangka, Terdakwa dan Terpidana.....	42
5. Tinjauan Pembuktian Dan Alat-alat Pembuktian	
Dalam Hukum Acara Pidana.....	43
6. Tinjauan Umum Tindak Pidana	50
BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM..... 56	
A. Ringkasan Putusan	56
B. Pertimbangan Hukum	57
BAB IV ANALISIS KASUS	60
1. Analisis Putusan Nomor 737/Pid.B/2019/PN.Bdg	60
2. Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis	64
BAB V KESIMPULAN	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	